



PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2022/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxx xxxxx xxxxx**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Possi tanah, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Andi Mallarangang, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Taman Makan Pahlawan Nomor 5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ylbhram@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 348/SK/XII/2022/PA.Bik. tertanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**XXXXXXXXX xxx xxxxxxxx**, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Dusun possi tanah, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.Bik



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 849/Pdt.G/2022/PA.Blk pada tanggal 19 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4-Agustus 1993 di Kampung Reka Halus Daerah Beluran Residensi Sandakan,Negeri Sabah Malaysia sebagaimana yang di daftarkan pada MUIS(Majelis Ugama Islam Sabah,Malaysia Timur) Pekan Beluran, Daerah Beluran Residensi Sandang Bil:Daftar 195/93 yang dikeluarkan oleh pejabat MUIS pada 4-8-1993;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal bersama selayak pasangan suami di Kampung Reka Halus,Pekan Beluran,Daerah Beluran Residensi Sandakan ,Negeri Sabah Malaysia Timur sampai tahun 2003 selama 11 tahun dan telah di karunia anak 6 orang anak yaitu 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan,2 anak laki-laki sudah menikah dan hidup sendiri sedangkan 4 anak perempuan diperlihara oleh penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pulang kampung di Dusun Possi tana, Desa Batang,Kecamatan Bontotiro,Kabupaten Bulukumba dab tinggal dirumah orang tua tergugat sampai april 2020;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan obktober tahun 2021, keharmonisan itu tidak bisa lagi dipertahankan disebabkan karena tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada penggugat, sehingga Penggugat pergi ke Malaysia timur untuk mencari nafkah untuk memberi nafkah kepada ke 4 anak perempuan Penggugat dan Tergugat dan setelah 1 tahun di Malaysia Penggugat pulang kampung dan setelah sampai di kampung Tergugat sudah pergi ke Malaysia Timur, sehingga Penggugat tidak lagi pulang ke rumah orangtua Tergugat, tetapi ke rumah sepupu Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun lama;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat kelakuan dari Tergugat maka Penggugat merasa tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpan dari maksud dan tujuan perkawinan;
6. Bahwa permasalahan ini telah diketahui oleh keluarga Penggugat dan orangtua Tergugat dan sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak upaya untuk mengubah perilakunya;
7. Permasalahan pereraian antara Penggugat dan Tergugat sudah disidang pada bulan septmber 2022, tetapi dicabut karena Tergugat dipanggil pada alamat dalam gugatan ternyata Tergugat tidak ditemui dan kepala Desa tidak mau menandatangani relas panggilan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Bulukumba untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhtra tergugat terhadap penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhtra tergugat (Xxxxxxxx xxx xxxxxx) terhadap penggugat (Xxxxx xxxxx xxxxx);
3. Membabankan biaya menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Swara Panrita Lopi sebagaimana relaas Nomor 849/Pdt.G/2022/PA.Blk tanggal 20 Desember 2022 dan 20 Januari 2023 yang telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/93/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah MUIS (Majelis Ugama Islam Sabah, Malaysia Timur) tanggal 04 Agustus 1993. Bukti tersebut dibubuhi meterai dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayak pasangan suami di Kampung Reka Halus, Pekan Beluran, Daerah Beluran Residensi Sandakan, Negeri Sabah Malaysia Timur sampai tahun 2003 (selama 11 tahun) dan telah dikarunia anak 6 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak perpisahan tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxxxx xxxx xxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayak pasangan suami di Kampung Reka Halus, Pekan Beluran, Daerah Beluran Residensi Sandakan, Negeri Sabah Malaysia Timur sampai tahun 2003;
- Bahwa selama 11 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikarunia anak 6 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak harmonis lagi

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.BK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak perpisahan tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas alat buktinya, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan dalam keadaan Suci dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.BK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَازَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Ruslan Andi Mallarangang, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 348/SK/XII/2022/PA.Blk. tertanggal 12 Desember 2022, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir (*vide* Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa ada alasan yang sah atau dibenarkan secara hukum, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 3 yaitu “...pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses *pembuktian*” dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil terkait alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.BK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini MUIS (Majelis Ugama Islam Sabah, Malaysia Timur), merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 04 Agustus 1993 telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPperdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah dan resmi, maka Penggugat dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dan Xxxxxx xxxx xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang mana saksi-saksi tersebut telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 RBg oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 6 (enam) anak;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan dalam membangun sebuah rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.BIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan istri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga yang demikian tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan dan berujung perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Poin 4 sebagai tolak ukur dalam memutus perkara perceraian, yang pada pokoknya suatu rumah tangga dikatakan *broken marriage* apabila memenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- e. Terdapat alasan perceraian yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta-fakta di atas ditemukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana hal tersebut tidak selalu ditandai dengan adanya perkecokan suami dan istri secara nyata, namun saling diamnya antara suami dan istri diikuti pisah tempat tinggal di antara keduanya sedang pelaksanaan fungsi berumah tangga selayaknya suami dan istri baik dari segi lahiriah seperti saling melayani dan membantu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga maupun dari segi bathiniah seperti adanya saling perhatian dan kasih mengasahi satu sama lain, tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka hal ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.BIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan juga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalnya kurang lebih 2 (dua) tahun, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, kemudian Majelis Hakim dan keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedang Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami istri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat yang alasan perceraianya merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukunkannya kembali, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Tergugat oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan gugat satu bain”;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan Suci dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXX xxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXX xxxxxx xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 *Hijriyah* oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Arif, S.H.I.**

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

**Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Baharuddin, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara:

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.849/Pdt.G/2022/PA.BIK